



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP) TRIWULAN III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAPPEDA

PROVINSI SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Bappeda Tahun 2025 berisi pengukuran kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Bappeda Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026

Palembang,

2025

KEPALA BAPPEDA



REGINA ARIYANTI, S.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712042002122003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi Organisasi	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan dan Sasaran Srategis	4
1.4 Analisis Lingkungan Internal	8
1.4.1 SDM yang berkualitas	11
1.4.2 Proses Bisnis	14
1.4.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov Sumsel	23
1.4.4 Sasaran Renstra	24
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	26
2.1 Indikator Kinerja Utama	26
2.2 Perjanjian Kinerja Indikator	28
2.2.1 Perjanjian Kinerja Esselon II	28
2.2.2 Perjanjian Kinerja Esselon III	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	36
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	37

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda	37
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	39
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.2 Realisasi Anggaran Triwulan II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	47
3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025	42
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.6	
Tabel 1.2	Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	7
Tabel 1.3	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	11
Tabel 1.4	Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2025	12
Tabel 1.5	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	12
Tabel 1.6	Perumusan Strategi	23
Tabel 1.7	Daftar Aset Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Data KIB per Maret 2025)	25
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	29
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	30
Tabel 2.5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	31
Tabel 2.6	Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera.....	32

Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera.....	33
Tabel 3.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	36
Tabel 3.2	Membandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 (Triwulan III).....	37
Tabel 3.3	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Periode Bulan Januari-Maret2025	38
Tabel 3.4	Perumusan Strategi	42
Tabel 3.5	Rencana Diklat Tahun 2025-2029.....	44
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	48
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	49

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pergub No.25 Tahun 2018	10
Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai.....	13
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis.....	15
Gambar 1.4 Kerangka Kerja Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	16
Gambar 1.5a Peta Proses Bisnis Level 0 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	17
Gambar 1.5b Peta Proses Bisnis Level 1 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	18
Gambar 1.6 Peta Sub Proses Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	19
Gambar 1.7 Peta Relasi.....	20
Gambar 1.8 Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.	21
Gambar 1.9 Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.....	22
Gambar 3.1 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi dan Misi Organisasi

Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”** dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2025-2026.

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peratuan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita

Daerah Proses Bisnis Tahun 2019 Nomor 25);

23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan seperti pada tabel 1.1, yaitu:

Tabel 1.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan :Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,25	7,30	7,35
		Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	-	80%-95%	80%-95%
	● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	%	100%	100%	100%
	● Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	80%-95%	80%-95%	80%-95%

Tabel 1.2
Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
					2025
1	2		3	4	8
	Tujuan :Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional	Nilai	7,30
			Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Nilai	80%-95%
		● Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	Persen	100%
		● Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Persen	80%-95%

1.4 Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan;
- 2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- 3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.

3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Subbidang Pemerintahan;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

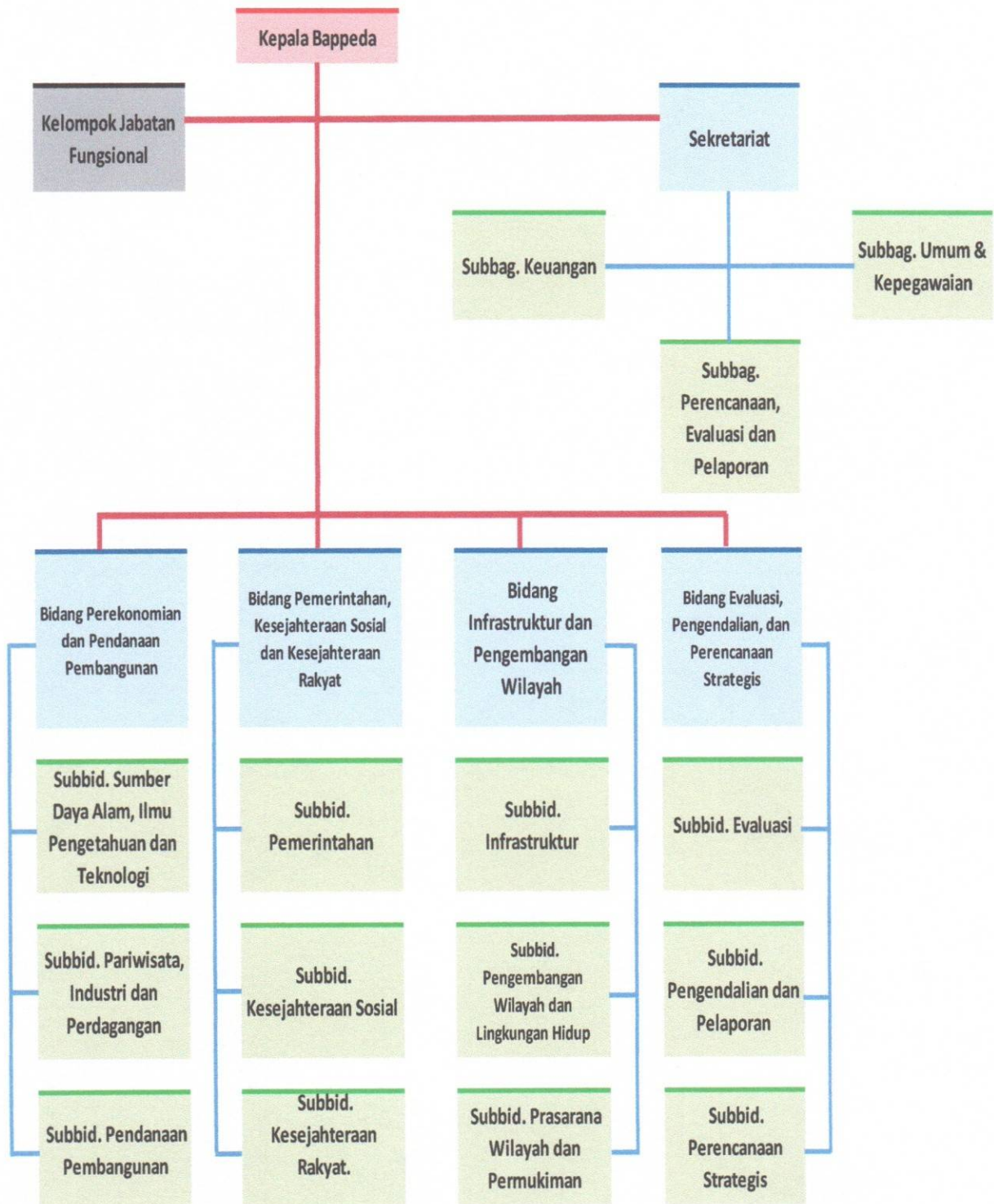
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Subbidang Infrastruktur;
- 2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

- 1) Subbidang Evaluasi;
- 2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- 3) Subbidang Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 25 tahun 2018

1.4.1 Sumber Daya Manusia Berkualitas

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda sampai dengan Tahun 2025 tercatat adalah sebanyak 151 (Seratus lima puluh satu) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan sebanyak 86 orang dan ASN laki-laki sebanyak 67 orang, dengan rincian pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala		1	1
2	Sekretariat	13	18	31
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	4	9	13
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan	9	10	20
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	9	2	11
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6	10	16
7	Kelompok Jabatan Fungsional	25	34	59
8	Jumlah	66	86	151

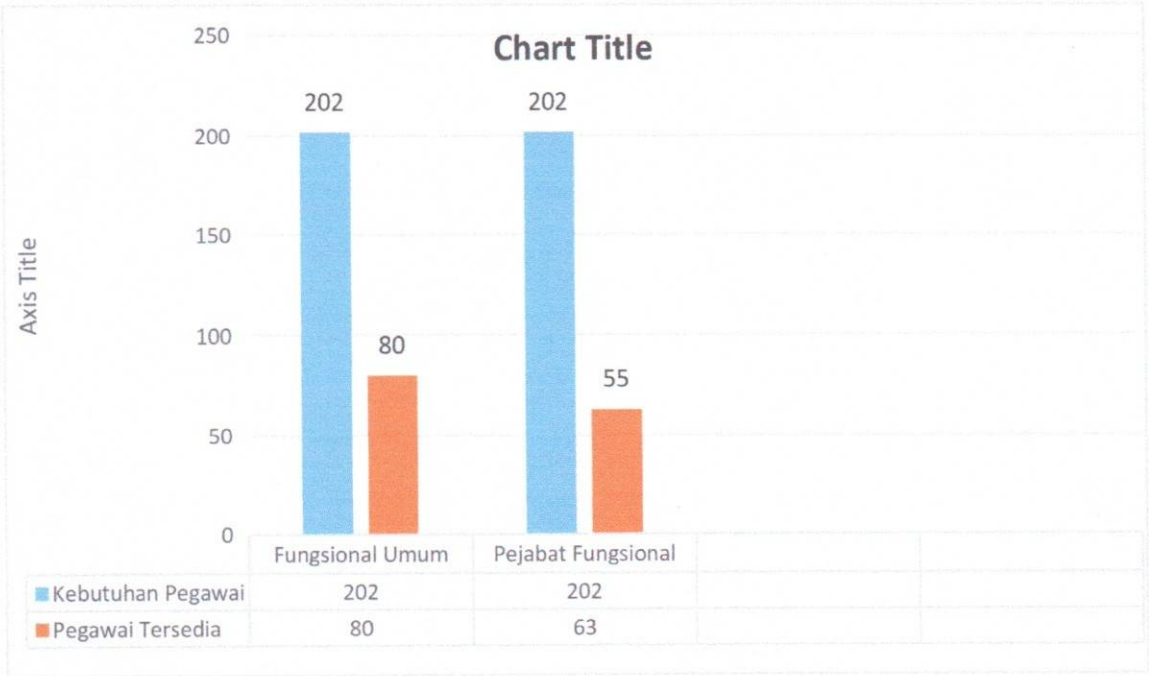
Tabel 1.4
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Golongan																			
		II				III								IV							
		C		D		A		B		C		D		A		B		C		D	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK
1	Kepala																	1			
2	Sekretariat		1	1		3	1			1	4	5	4	3			1				
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis						1		2	2		1	1	1	2						
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					1	3				4	2	3		3						
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat							1		1	2	2			4		1				
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										3	4	3			1					
7	Kelompok Jabatan Fungsional					15	21		2	3	7	1		2	4	3					3
8	Jumlah		1	1		19	26	1	4	7	19	15	11	6	13	4	2	1			3

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		SLTA		D3		S1		S2		S3	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala						1				
2	Sekretariat	2	3	1	3	6	7	4	4		
3	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis					2	4	2	3		
4	Bidang Perekonomian dan Pendapatan Pembangunan					4	6	4	5		
5	Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat					4	2	6	1		
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2				3	7	1	2		
7	Kelompok Jabatan Fungsional					15	29	9	6	2	1
8	Jumlah	4	3	1	3	34	56	26	21	2	1

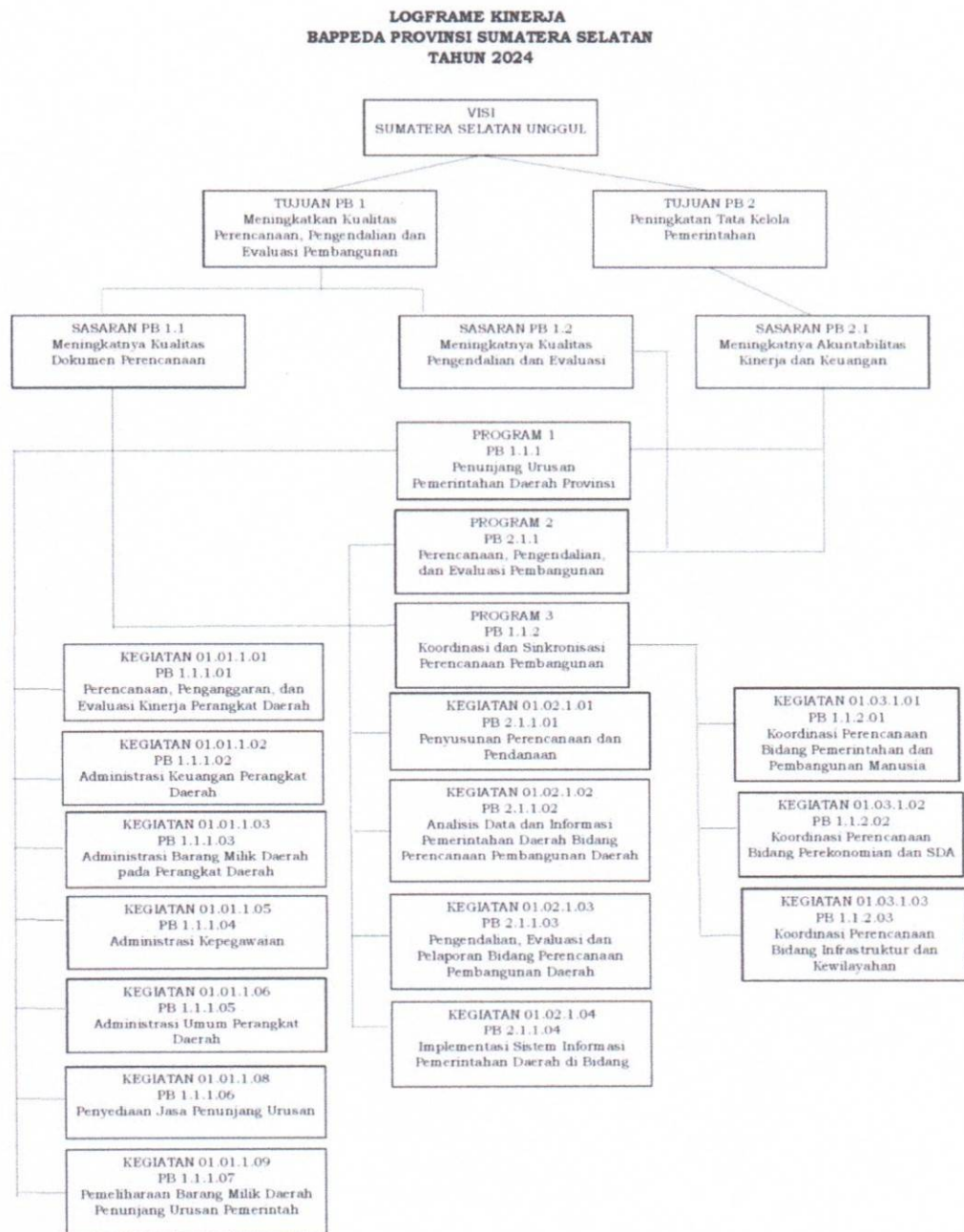
Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) Bappeda yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kebutuhan Pegawai, kebutuhan pegawai Bappeda adalah sebanyak 425 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 21 orang, Jabatan Fungsional 202 orang dan Pelaksana 202 orang.



Gambar 1.2
Kebutuhan Pegawai

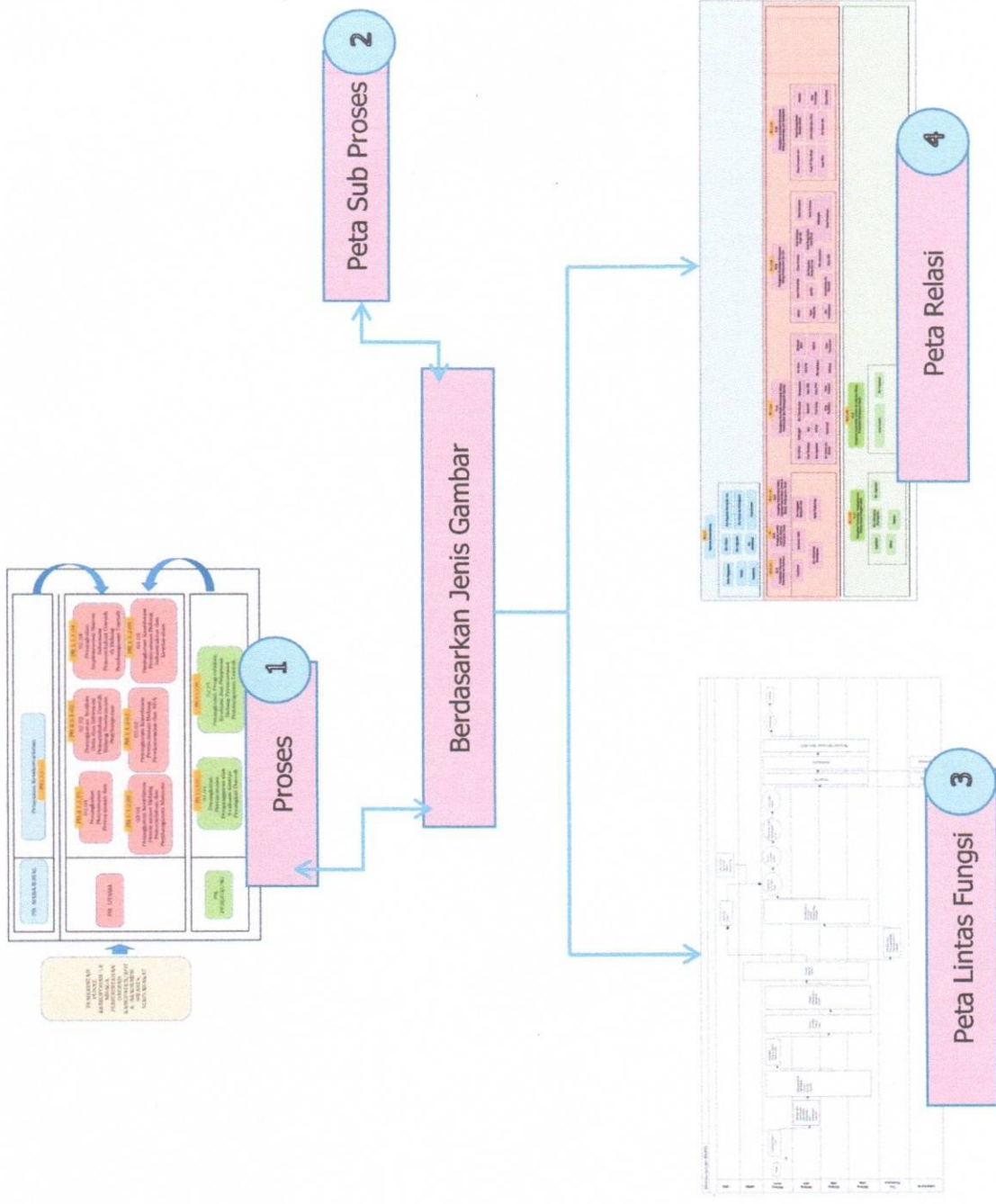
1.4.2 Proses Bisnis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

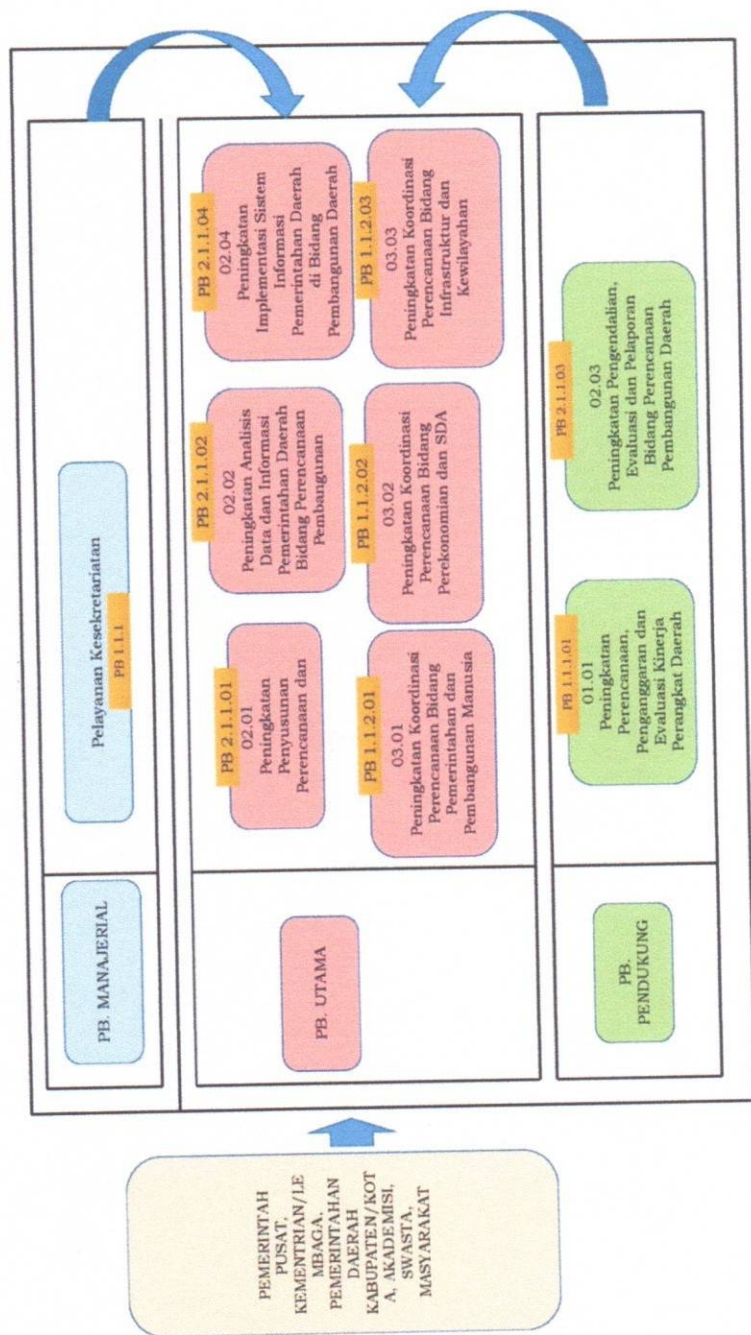


Gambar 1.3

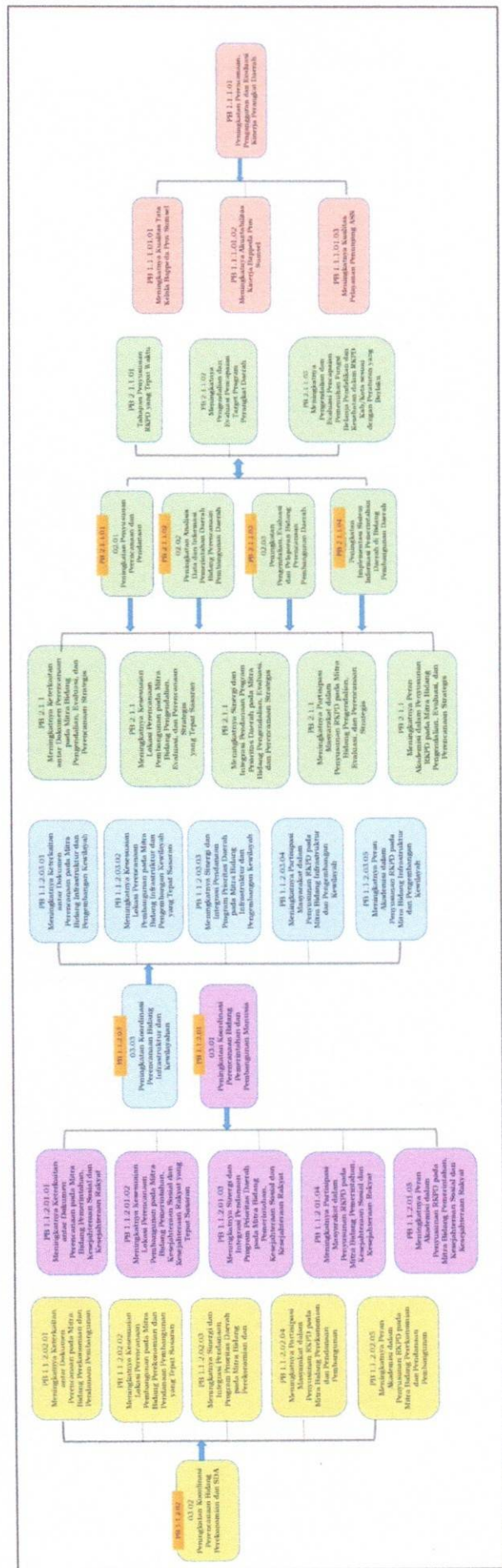
Kerangka Kerja Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



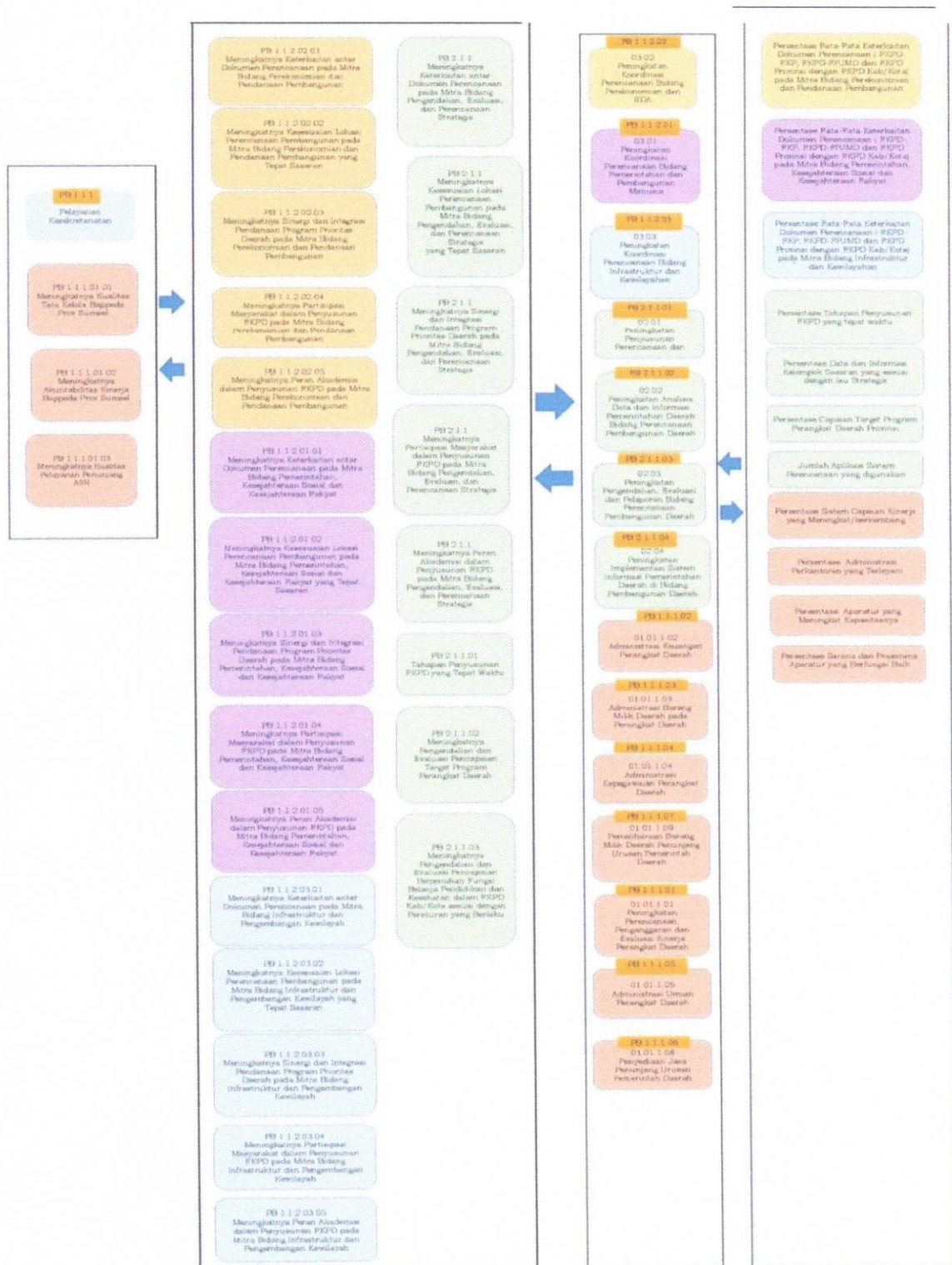
Gambar 1.4
Peta Proses Bisnis



Gambar 1.5a
Peta Proses Bisnis Level 0
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



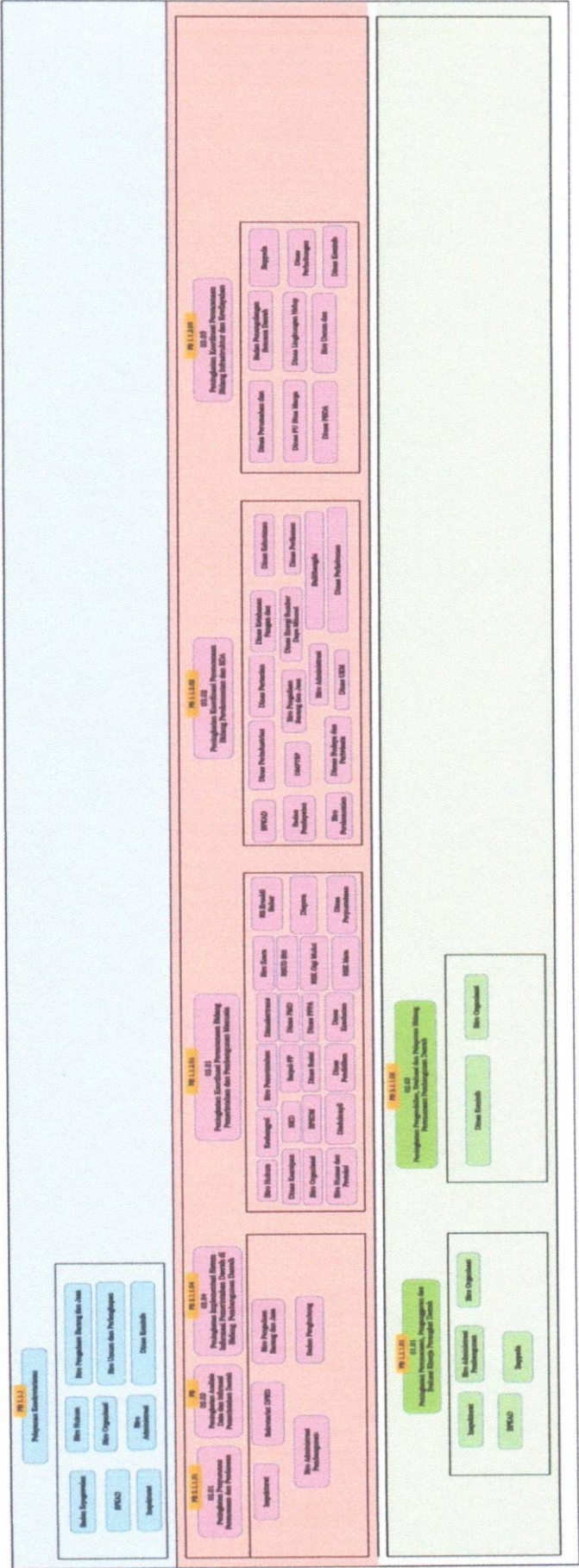
Gambar 1.5b
Peta Proses Bisnis Level 1 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1.6

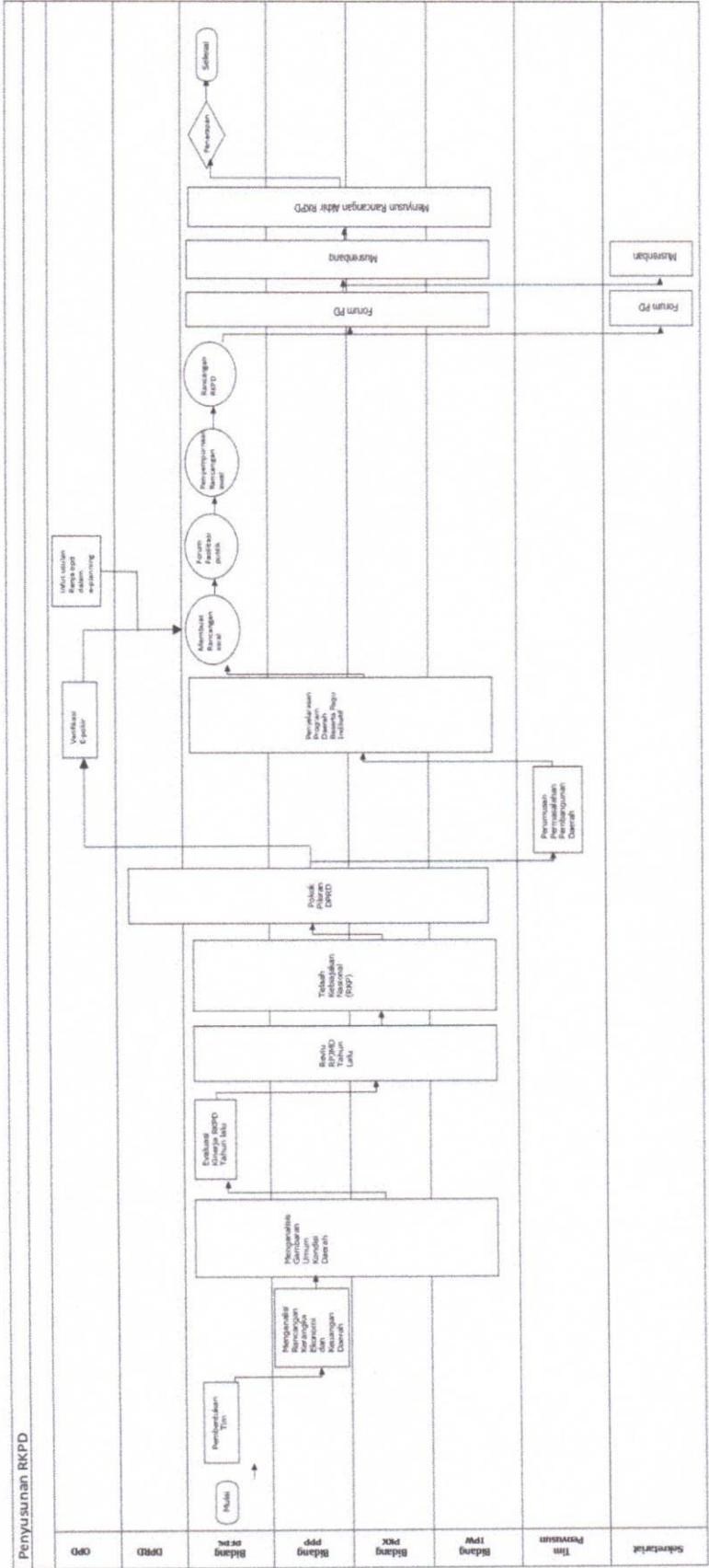
Peta Sub Proses Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Peta Relasi
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1.7
Peta Relasi

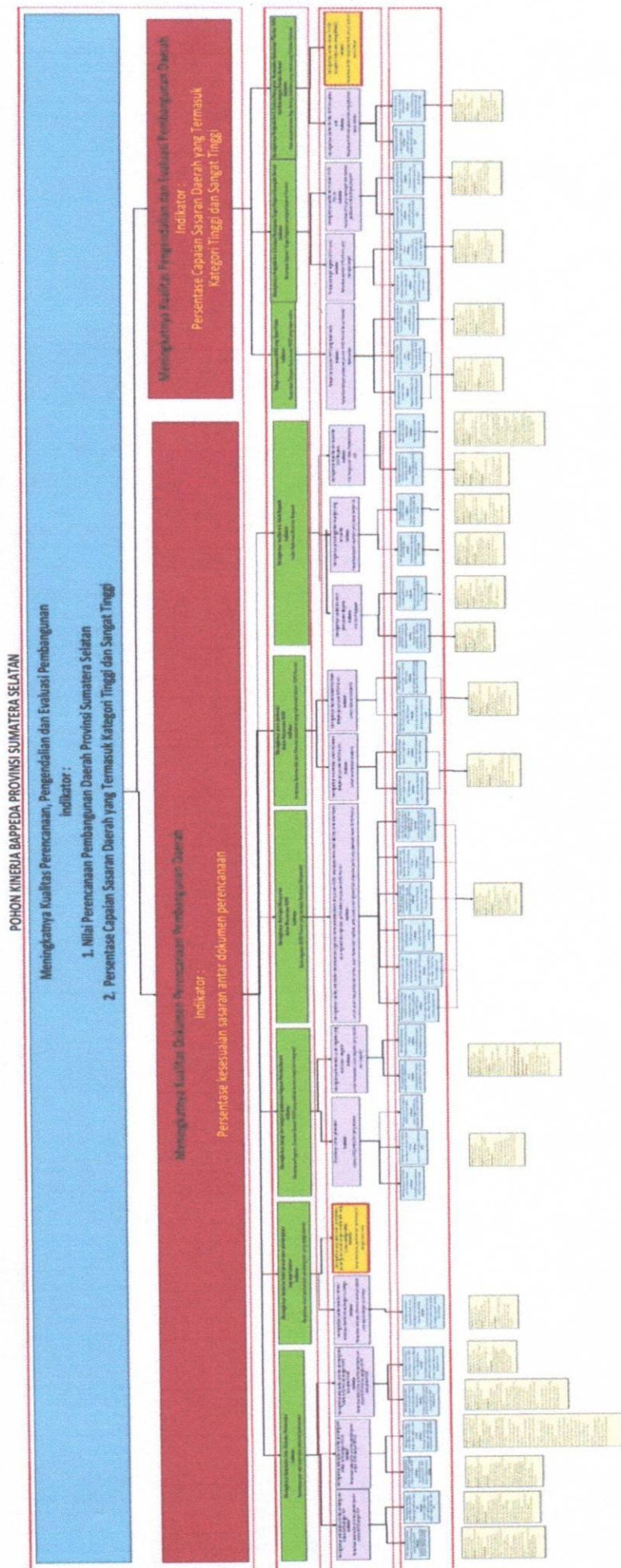
PETA LINTAS FUNGSI
PB2.1.1.01
02.01 Penyusunan RKPD
2025



Gambar 1.8
Peta Lintas Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.5 Pohon Kinerja

Berikut ini adalah gambaran Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 1.9

Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

1.4.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan. Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian. Perumusan isu strategis :

Tabel 1.6
Perumusan Strategis

No	Telaah	Perumusan Isu Strategis
1	Belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam merencanakan pembangunan yang sejalan dengan nasional dan daerah	Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
2	Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada Tahun 2019-2023, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja Tahun 2020 yaitu RKPD Tepat Waktu.	
	Belum optimalnya kualitas substansi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan di Sumatera Selatan	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
	Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Provinsi sesuai dengan kalender perencanaan
	Belum optimalnya penyampaian laporan triwulanan OPD Tepat Waktu	Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
	Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang mengajukan fasilitasi RKPD tepat waktu	Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

1.4.4 Sasaran Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru mengacu pada rencana pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang tersusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2026.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatkan Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan.
- b. Meningkatkan Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu Persentase capaian Sasaran Daerah yang sesuai dengan target.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin di capai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yang menjadi Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan

Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1. Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional 2. Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	7,30		
2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100 %	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	80% -95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II

Berdasarkan tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang ditetapkan. Pertama, tersusunnya laporan penilaian, evaluasi, serta fasilitasi perencanaan pembangunan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya meliputi jumlah laporan penilaian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan dengan target sebanyak 8 dokumen, serta jumlah tulisan atau narasi yang disusun sebagai bahan untuk buletin dan jurnal di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah diedit dengan target sebanyak 3 dokumen. Kedua, tersusunnya laporan ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi kebijakan maupun makalah kebijakan perencanaan pembangunan dengan fokus pada tematik kemiskinan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah jumlah laporan ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan tematik kemiskinan dengan target satu dokumen.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian sasaran antar dokumen perencanaan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80%-95%

2.3 Perjanjian Kinerja Esselon III

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, terdapat empat sasaran strategis utama yang ditetapkan. Pertama, peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda dengan indikator nilai SAKIP yang ditargetkan mencapai AA (91,63). Kedua, peningkatan realisasi keuangan Bappeda melalui persentase realisasi program dan kegiatan dengan target 98,09%. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan penunjang ASN yang diukur melalui Indeks Profesionalisme ASN dengan target kategori Tinggi. Keempat, terlaksananya pengelolaan arsip dengan indikator hasil audit sistem kearsipan yang ditargetkan memperoleh nilai AA (Sangat Memuaskan).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	AA (91,63)
2	Meningkatnya Realisasi Keuangan Bappeda	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda	98,09%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Tinggi
4	Terlaksananya Pengelolaan Arsip dengan Baik	Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal	AA (Sangat Memuaskan)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Fokusnya mencakup keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas, partisipasi masyarakat, serta peran akademisi dalam penyusunan

RKPD, masing-masing dengan target capaian 100%. Selain itu, ditetapkan pula sasaran peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target capaian 80%–95%.

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan
Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keterkaitan antar dokumen perencanaan dan pendanaan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (Renstra OPD, RKPD - RPJMD, RKPD Provinsi - RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD (RPJPN) pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%
2	Meningkatnya kesesuaian lokasi perencanaan pembangunan pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang tepat sasaran	Persentase lokasi pembangunan mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang tepat sasaran	100%
3	Meningkatnya sinergi dan integrasi pendanaan program prioritas daerah	Persentase program prioritas daerah RKPD yang didanai secara sinergi dan integratif	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase kegiatan RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan sumber daya alam	Persentase capaian perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan pendanaan pembangunan yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80–95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Target yang ditetapkan meliputi keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta masukan akademisi dalam penyusunan RKPD, seluruhnya dengan capaian 100 persen. Selain itu, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra infrastruktur ditargetkan mencapai 80%–95% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Tepat Sasaran	100%
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang didanai secara sinergi dan terintegrasi	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	100%
5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Rekomendasi dan Masukan Akademisi yang sesuai dengan Prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat tujuh sasaran strategis. Sasaran tersebut mencakup peningkatan keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD, masing-masing dengan target capaian 100 persen. Selain itu, ditetapkan peningkatan peran akademisi dalam penyusunan

RKPD dengan target 100%, pencapaian target program perangkat daerah sebesar 80%, serta peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra dengan target 80%-90% pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan
Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Rata-rata Keterkaitan Dokumen Perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	Persentase Lokasi Pembangunan Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang Tepat Sasaran	100%
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah pada Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase Program Prioritas Daerah RKPD Mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang mendanai secara sinergi dan integratif	100%
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD	Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang berbasis partisipasi masyarakat	100%
5	Meningkatnya peran akademisi dalam penyusunan RKPD	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang diakomodir dalam RKPD Provinsi	100%
6	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi	80%
7	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sektor Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80-95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memuat delapan sasaran strategis. Fokusnya diarahkan pada keterkaitan antar dokumen perencanaan, ketepatan lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program prioritas daerah, partisipasi masyarakat, serta kontribusi akademisi dalam penyusunan RKPD dengan capaian target 100 persen. Selain itu, sinkronisasi dokumen SDGs dan integrasi rencana penanggulangan kemiskinan daerah juga ditetapkan dengan target 100 persen, sementara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mitra ditargetkan 80–95 persen.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rata-rata keterkaitan dokumen perencanaan (RKPD-RKP, RKPD-RPJMD dan RKPD dengan RKPD Kabupaten/Kota, RPJMD-RPJPD) pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Lokasi Perencanaan Pembangunan pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran	Persentase lokasi pembangunan Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	100%
3	Meningkatnya Sinergi dan Integrasi Pendanaan Program Prioritas Daerah RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase program prioritas daerah RKPD Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Rasio kegiatan RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang berbasis partisipasi	100%

5	Meningkatnya Peran Akademisi dalam Penyusunan RKPD pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi dan masukan akademisi yang sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi pada Mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	100%
6	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%
7	Meningkatnya Sinkronisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Persentase dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi	100%
8	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sektor Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tinggi dan sangat tinggi	80%–95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan mengemban amanah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam pelaksanaannya mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), telah

dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi menunjukkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 91,63 (Sembilan puluh satu koma Enam Puluh Tiga) atau predikat “AA” (Sangat Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Sasaran antar Dokumen Perencanaan	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80%-95%	70%

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir Dapat Dilihat Pada Tabel Di Bawah Ini:

Tabel 3.2
Membandingkan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 (Triwulan II)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-		
		2023	2024	2025
1.	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	100%	100%	100%
2.	Ketepatan Penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat Waktu	-	-
3.	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	100%	-	-
4.	Persentase Capaian Sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	-	94,06%	70%

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappeda:

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja 2024-2025 (Triwulan II)

No	Sasaran		Indikator		Target			Realisasi Kinerja		
	Renstra		Renja		Renstra		Renja	Renstra		Renja
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2024	2025	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian sasaran antar dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian sasaran antar dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase Capaian Sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	80%-95%	80%-95%	94,06%	70%

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam penyusunan strategi ini digunakan metode analisa *Strenght Weakness Opportunity Threat* (SWOT) yang mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

1. Kekuatan

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kekuatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Tersedianya sistem aplikasi yang didukung jaringan internet yang memadai;
- b. Tersedianya Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. Motivasi kerja yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- d. Sarana dan Prasarana kerja yang memadai;
- e. Telah mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (KSP); dan

2. Kelemahan

Disamping kekuatan tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kuantitas SDM berdasarkan Analisis Jabatan di Bappeda;

- b. Belum optimalnya kualitas SDM Perencana di Bappeda;
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi berbagai sumber- sumber pendanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai dasar penyusunan perencanaan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- f. Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
- g. Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD.

3. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, ICRAF, BUMN, dan Swasta) untuk melakukan kerja sama pembangunan di Sumatera Selatan;
- c. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas; dan
- e. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan /Diklat untuk meningkatkan kualitas SDM Bappeda.

4. Ancaman

Selain peluang yang dimiliki, beberapa ancaman juga perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Adanya kebijakan Mutasi ASN yang keluar dari Bappeda;
- b. Adanya kebijakan *Refocusing* Anggaran;
- c. Pesatnya perkembangan Teknologi dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan; dan
- d. Belum optimalnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah dan Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut :

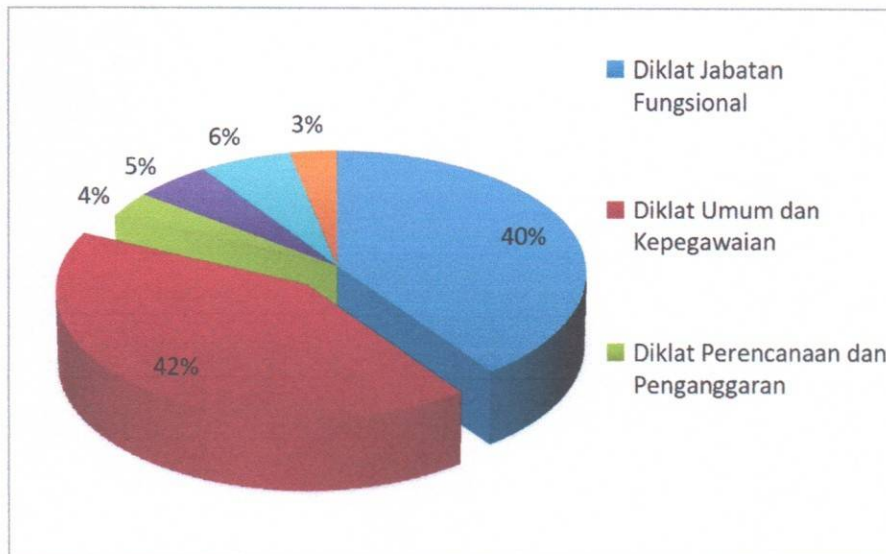
Tabel 3.4
Perumusan Strategi

No	Telaah	Perumusan Isu Strategis
1	Belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam merencanakan pembangunan yang sejalan dengan nasional dan daerah	Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
2	Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada Tahun 2019-2023, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja Tahun 2020 yaitu RKPD Tepat Waktu.	
	Belum optimalnya kualitas substansi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan di Sumatera Selatan	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
	Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Provinsi sesuai dengan kalender perencanaan
	Belum optimalnya penyampaian laporan triwulanan OPD Tepat Waktu	Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
	Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang mengajukan fasilitasi RKPD tepat waktu	Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan kapabilitas pegawai Bappeda diperlukan Diklat Kepemimpinan maupun Diklat-Diklat Teknis. Pejabat Struktural Bappeda yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagai syarat menduduki jabatan struktural Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pegawai yang mengikuti DIKLATPIM III/SPAMA, dan sebanyak 8 orang laki-laki dari pegawai yang mengikuti DIKLAT PIM IV/ADUMLA.

Gambar 3.1
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat
tahun 2025



Telah mengikuti diklat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diklat umum dan kepegawaian sebanyak 42% terdiri dari :
 - Diklat Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi jabatan
 - Diklat Arsip
2. Diklat Jabatan Fungsional sebanyak 40% terdiri dari :
 - Diklat Jabatan Fungsional Perencana
3. Diklat Perekonomian dan Pendanaan 3% terdiri dari :
 - Diklat Penyusunan Data dan Informasi Diklat Pemerintahan
4. Diklat Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 5% yang terdiri dari :
 - Diklat arah kebijakan dana alokasi khusus tahun 2023 penurunan Stunting.
 - Diklat *Sharing Knowledge* dan peningkatan kapasitas *SDGs Centers* dalam pelaksanaan TPB/SDGs
 - Diklat Perencanaan dan Penganggaran 4% yang terdiri dari diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Perencanaan Berbasis data Program BPMP.

5. Diklat Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 6% yang terdiri dari :

- Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan tema "Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas"
- Penyusunan Profil Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan dengan tema "Skenario Transisi Energi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024"

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai Bappeda maka direncanakan setiap tahun ada pegawai Bappeda yang dapat mengikuti Diklat-diklat, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran Bappeda Prov Sumsel yaitu pada tabel 3.5 di bawah ini;

Tabel 3.5
Rencana Diklat tahun 2025-2029

No	Unit Kerja	Pendidikan	Jumlah Rencana Pegawai Yang Mengikuti Diklat
1	SEKRETARIAT	1. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	25
		2. Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Instansi Pemerintah	25
		3. Diklat Penyusunan Manajemen Resiko Instansi Pemerintah (Risk Register)	25
		4. Diklat PIM IV	5
		5. Bimtek Barang dan Jasa	25
		6. Bimtek Pengelolaan Aset	40
		7. Bimtek SDM Aparatur	40

No	Unit Kerja	Pendidikan	Jumlah Rencana Pegawai Yang Mengikuti Diklat
		8. Bimtek Public Speaking	191
		9. Bimtek Etika Pegawai	200
		10. Diklat Arsiparis	20
		11. Diklat Pranata Komputer	25
		12. Bimtek Tata Naskah Dinas	25
		13. Bimtek Keprotokolan	25
		14. Bimtek Fotografer & Video	20
		15. Diklat Pengelolaan Keuangan	20
		16. Diklat Bendahara	10
2	PEPS	1. Diklat Perencanaan dan Penganggaran	100
		2. Diklat Monitoring dan Evaluasi	100
		3. Diklat Penyusunan RPJMD dan RENSTRA	100
		4. Diklat Penyusunan RPJPD	100
3	PPP	1. Diklat Bisnis Plan (Investasi)	50
		2. Diklat Makro Ekonomi	50
		3. Diklat Carbon Market (Dana Transfer)	50
4	IPW	1. Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan : Bidang Sanitasi/Perumahan	30
		2. Bimtek Survey dan Pemetaan dan Webgis	30
		3. Diklat /Bimtek KLHS RPJMD	30
		4. Diklat /Bimtek KLHS RPJPD	30
		5. Bimtek Tata Ruang Provinsi	25

No	Unit Kerja	Pendidikan	Jumlah Rencana Pegawai Yang Mengikuti Diklat
		6. Bimtek ARCGIS Dasar	25
		7. Bimtek ARCGIS Tingkat Lanjut	20
		8. Bimtek Perhitungan Emisi Carbon/Carbon Trade	30
		9. Bimtek Pembuatan Metadata Spasial dan Penjamin Kualitas Data	25
5	PKK	1. Diklat 8 Aksi Konvergensi Stunting	50
		2. Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (RAPID RURAL APPRASIAL)	50
		3. Bimtek Indeks Demokrasi Indonesia	50
		4. Bimtek Pengarusutamaan Gender	50
		5. Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Literasi bagi Aparatur Perencana	50

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Ketepatan Penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	-	-
2.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	83%	-	-	100%	-	-
3.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	-	80%-95%	80%-95%	-	94,06%	70%

3.2 Realisasi Anggaran Triwulan II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	86.46	84.33	20,975,395,808.00	63.20	76.00	68.26	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0.37	100	44,539,402.00	31.59	70.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	0.37	100	44,539,402.00	31.59	70.00	0.26	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	68.47	85.39	18,467,113,067.00	70.27	84.50		

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	66.88	85.33	18,069,437,887.00	70.39	85.00	56.84
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,236,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi + 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	0.70	98.19	241,142,000	89.57	95.00	0.67
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0.74	75.81	127,254,000.00	44.94	78.00	0.58
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,550,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0.15	100	29,279,180.00	50.88	80.00	0.12
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	0.38	100	98,730,750.00	67.94	100.00	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.26	100	98,730,750.00	98.73	100.00	0.26
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	1.33	82.13	140,734,338.00	27.55	82.50	

7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	1 Dokumen	0.17	100	39,505,051.00	59.14	0.14
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0.22	100	78,439,000.00	94.40	0.21
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0.12	90.00	22,790,287.00	50.65	0.08
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0.82	72.53	0.00	0.00	0.70
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	8.82	72.74	743,312,072.00	21.95	60.00

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.52	90.00	158,687,000.00	79.34	85.00	0.44
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	1.32	77.63	171,380,701.00	33.79	75.00	0.99
15	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0.50	87.09	95,148,000.00	49.14	70.00	0.35
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,048,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	2.05	100	300,859,921.00	38.28	65.00	1.33

18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	0.61	68.16	17,236,450.00	7.37	65.00	0.40
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.00	Kota Palembang			0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,514,000,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	3.94	84.91	947,322,240.00	62.57	68.75	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	0.03	100	3,002,900.00	30.03	55.00	0.01
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan)	2.14	84.61	520,069,340.00	63.27	75.00	1.61

[illegible]

27	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	178,494,238	Kota Palembang	Jumlah Dokumen RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	0.46	98.32	0.00	100.00	0.46
28	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah	62,293,638	Kota Palembang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	0.16	100	31.76	100.00	0.16
29	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	531,600,000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBAN G RKPD 2026 DAN BA MUSRENBAN G RPJMD 2025-2029)	1.38	100	86.63	100.00	1.38
30	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	831,366,824	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029	2.17	93.59	49.79	100.00	2.17
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192,923,105	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0.50	100	61,419,830.00	50.00	

31	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167,949,000	Kota Palembang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	0.44	100	61,419,830.00	36.57	50.00	0.22
32	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24,974,105	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)	0.07	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	2.74	94.29	333,247,821.00	31.70	66.67	

33	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	98,076,250	Kota Palembang	Telaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	0.26	100	32,132,260.00	32.76	60.00	0.15
34	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0.13	100	4,076,700.00	8.45	20.00	0.03
35	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0.81	80.77	115,901,520.00	37.15	70.00	0.57
36	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 DOKUMEN (1 DOK FASILITASI RANPERKAD A RKPD KAB/KOTA 2026, 1 DOK FASILITASI RAPERKADA RKPD PERUBAHAN 2025 KAB/KOTA, 1 DOK FASILITASI RANWAL	1.54	100	181,137,341.00	30.55	70.00	1.08

						RANPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI RAPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK EVALUASI KINERJA PEMBANGU NAN KAB/KOTA, 1 DOK HASIL PENILAIAN PPD KAB/KOTA)									
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan		1 Aplikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

38	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00			0.00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,883,428	Kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	6.12	98.10	759,450,011.00	32.30	100,00	3.69
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.32	96.64	252,922,054.00	28.35	100,00	
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.16	100	13,217,710.00	21.53	100,00	0.10

40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,250,564	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.14	100	5,200,000.00	9.41	100,00	0.08
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,460,296	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.15	100	2,150,484.00	3.68	100,00	0.08
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95,654,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.25	100	5,192,000.00	5.43	100,00	0.14
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178,490,399	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.46	83.19	30,061,410.00	16.84	100,00	0.26

44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,470,613	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100	6,420,000.00	10.98	100,00	0.09
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58,670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100	13,125,000.00	22.37	100,00	0.09
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325,691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	0.85	100	177,555,450.00	54.52	100,00	0.55
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1.80	100	237,319,895.00	34.39	100,00	

47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	0.62	100	138,535,971.00	58.67	100,00	0.43
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52,097,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	0.14	100	3,396,600.00	6.52	100,00	0.07
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.08	100	0.00	0.00	100,00	0.04
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	0.54	100	60,591,221.00	29.17	100,00	0.35

51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembang an SDA)	0.08	100	13,100,985.00	41.83	100,00	0.05
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,597,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.08	100	0.00	0.00	100,00	0.04
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,203,802	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.07	100	0.00	0.00	100,00	0.04
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74,155,390	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	0.19	100	21,695,118.00	29.26	100,00	0.12

3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	768,628,112	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.00	98.09	269,208,062.00	35.02	100,00	
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,926,125	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	0.22	100	2,709,000.00	3.27	100,00	0.13
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72,391,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.19	100	16,458,440.00	22.74	100,00	0.10
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82,426,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.21	96.73	22,309,100.00	27.07	100,00	0.12

58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89,956,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKPD/RPJMND pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0.23	100	51,288,799.00	57.02	100,00	0.14
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	148,991,422	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0.39	98.32	41,266,759.00	27.70	100,00	0.21
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84,158,750	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	0.22	97.03	33,484,368.00	39.79	100,00	0.12
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	82,356,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0.21	100	5,692,496.00	6.91	100,00	0.11

62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJP D/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur ; Jumlah Laporan yang disusun)	0.33	94.42	95,999,100.00	76.54	100,00	0.25
	Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan	38,387,144,866				100	86.03	23,023,783,695.00	59.98	78,69	78,18

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di Tahun keempat Periode Renstra 2025-2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian indikator sasaran BAPPEDA Tahun 2025 masuk dalam kategori belum berhasil (periode triwulan II)

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun *non formal* melalui pendidikan teknis dan fungsional;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik *intern* maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
5. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, 2025
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

**Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan**

Jl. Kapten A. Rivai No.23, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30127 Indonesia